

Tantangan demokrasi di era media sosial

Alfan Rizqana Arga Prakarsa

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang
e-mail: alfanprakarsa73@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi digital, media sosial, disinformasi, hoaks, partisipasi politik, literasi digital

Keywords:

Digital democracy, social media, disinformation, fake news, political participation, digital literacy

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah secara fundamental lanskap kehidupan demokratis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di satu sisi, platform digital memberikan ruang baru bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam diskursus politik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan aspirasi secara lebih luas dan cepat. Namun di sisi lain, karakteristik media sosial yang cenderung mendorong persebaran informasi secara viral membuka celah lebar bagi berkembangnya hoaks, disinformasi, polarisasi opini, dan manipulasi politik. Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis berbagai tantangan yang dihadapi sistem demokrasi akibat masifnya penggunaan media sosial, dengan fokus pada mekanisme pembentukan opini publik, fenomena filter bubble dan echo chamber, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial merupakan pedang bermata dua: ia memperkuat partisipasi sekaligus menjadi ladang subur bagi ancaman integritas demokrasi. Diperlukan penguatan literasi digital masyarakat, regulasi platform yang berimbang, serta kolaborasi multipihak untuk menjaga kualitas demokrasi di era digital.

ABSTRACT

The rapid growth of social media has fundamentally transformed the democratic landscape in many countries, including Indonesia. While digital platforms provide new spaces for citizens to participate in political discourse, monitor governance, and express their aspirations more broadly and rapidly, their viral nature also creates opportunities for misinformation, disinformation, opinion polarization, and political manipulation. This article critically examines the challenges facing democratic systems due to the massive use of social media, focusing on the mechanisms of public opinion formation, the phenomena of filter bubbles and echo chambers, and the erosion of public trust in democratic institutions. Using a descriptive-analytical literature review method, the study finds that social media is a double-edged sword: it strengthens participation while also becoming fertile ground for threats to democratic integrity. Strengthening digital literacy, balanced platform regulation, and multi-stakeholder collaboration are essential to safeguard democracy in the digital age.

Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan meniscayakan adanya partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Selama berabad-abad, partisipasi tersebut berlangsung melalui mekanisme konvensional seperti pemilu, unjuk rasa, maupun forum musyawarah. Namun memasuki abad ke-21, revolusi teknologi



informasi khususnya hadirnya media sosial telah membuka dimensi baru dalam praktik berdemokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ini berlangsung dengan sangat pesat. Data menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh signifikan dari tahun ke tahun, dengan media sosial menjadi salah satu saluran komunikasi yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat lintas generasi. Platform seperti Twitter/X, Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp kini menjadi ruang publik digital tempat berbagai isu sosial, budaya, dan politik diperbincangkan setiap harinya.

Di satu sisi, fakta tersebut membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi. Media sosial memudahkan warga untuk mengakses informasi, mengawasi kebijakan pemerintah secara real-time, serta memobilisasi dukungan bagi berbagai gerakan sosial. (Renata, 2025) mencatat bahwa generasi muda, khususnya Generasi Z, semakin menunjukkan peningkatan partisipasi politik melalui platform digital, termasuk dalam proses pemilihan umum. Hal senada diungkap oleh (Retavia, 2025) yang menyatakan bahwa media sosial telah menjadi agen perubahan sosial dan politik yang signifikan, mampu mempercepat persebaran informasi dan memperluas jangkauan mobilisasi massa.

Namun di sisi lain, kemudahan akses dan viralitas informasi di media sosial juga mengandung risiko serius bagi kualitas demokrasi. Disinformasi dan hoaks berkembang subur di ekosistem digital, memanfaatkan algoritma platform yang lebih mementingkan keterlibatan (engagement) ketimbang akurasi. (Afifah, 2025) mengingatkan bahwa kesadaran demokrasi warga negara yang belum matang, dipadukan dengan rendahnya literasi digital, menjadikan masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi yang mengancam nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini bermaksud mengkaji secara lebih mendalam berbagai tantangan yang dihadapi sistem demokrasi di era media sosial. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur yang bersifat deskriptif-analitis, artikel ini berupaya memetakan masalah, menganalisis mekanisme dan dampaknya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks, laporan lembaga riset, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik demokrasi dan media sosial. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data daring seperti Google Scholar, portal jurnal nasional SINTA, serta repositori kelembagaan. Artikel-artikel yang dipilih diprioritaskan yang diterbitkan dalam rentang 2019 hingga 2025 guna memastikan relevansi dengan kondisi terkini. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan-temuan literatur berdasarkan isu utama: partisipasi politik, penyebaran hoaks dan disinformasi, polarisasi opini, serta regulasi dan literasi digital.

Hasil dan Pembahasan

Media Sosial sebagai Ruang Baru Partisipasi Politik

Salah satu kontribusi paling nyata media sosial bagi kehidupan demokratis adalah perluasan ruang partisipasi publik. Sebelum era digital, keterlibatan warga dalam wacana politik kerap terbatas pada forum-forum formal yang memiliki hambatan akses tersendiri, baik dari segi waktu, jarak, maupun biaya. Hadirnya media sosial meruntuhkan hambatan-hambatan tersebut secara dramatis.

(Retavia, 2025) dalam kajiannya mengenai dampak media sosial terhadap transformasi sosial dan politik di era digital menegaskan bahwa platform digital telah menciptakan arena baru di mana warga biasa dapat terlibat langsung dalam pembentukan opini publik, ikut mendorong agenda kebijakan, bahkan memobilisasi massa dalam jumlah besar dengan biaya yang sangat rendah dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini tampak jelas pada berbagai gerakan sosial di Indonesia, mulai dari kampanye antikorupsi, gerakan lingkungan, hingga pengawasan pemilu berbasis warga.

Lebih jauh, (Renata, 2025) dalam artikelnya tentang partisipasi politik Generasi Z dalam demokrasi menemukan bahwa kalangan muda kini semakin memanfaatkan media sosial sebagai wahana untuk mengekspresikan preferensi politik, membangun kesadaran kolektif, dan memperluas jaringan advokasi. Keterlibatan digital generasi ini, meski kerap dipandang sebelah mata sebagai sekadar aktivisme virtual (*slacktivism*), dalam banyak kasus telah menghasilkan dampak nyata terhadap proses-proses demokratis.

Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa perluasan partisipasi ini tidak otomatis setara dengan peningkatan kualitas demokrasi. Partisipasi yang tidak dilandasi informasi yang akurat dan kapasitas berpikir kritis yang memadai justru dapat menjadi kontraproduktif, sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut dalam subbagian berikut.

Disinformasi dan Hoaks: Ancaman Nyata bagi Integritas Demokrasi

Jika partisipasi politik melalui media sosial dapat dipandang sebagai salah satu manfaat perkembangan teknologi digital bagi demokrasi, maka maraknya penyebaran disinformasi menjadi tantangan serius yang menyertainya. Kemudahan dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi memungkinkan berbagai pihak menyebarkan konten tanpa proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, hoaks dan berita palsu dapat dengan cepat tersebar luas, terutama karena algoritma media sosial cenderung mendorong konten yang mampu memicu respons emosional pengguna dibandingkan informasi yang telah teruji kebenarannya. Kesalahan logis dalam berpikir dan rendahnya kemampuan memverifikasi informasi menjadi faktor yang mempercepat penyebaran hoaks di ruang digital (Indah, 2020). Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif disinformasi terhadap kehidupan demokrasi.

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut kebingungan informasi di tingkat individu, melainkan menyerang jantung sistem demokrasi itu sendiri. (Afifah, 2025) dalam tulisannya tentang kesadaran demokrasi memaparkan bahwa persebaran hoaks secara

masif di media sosial berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi, mengikis partisipasi pemilih, dan mendorong sebagian masyarakat untuk mencari solusi di luar mekanisme demokrasi formal. Kondisi ini sangat berbahaya, karena kepercayaan (trust) merupakan fondasi utama yang menopang berfungsinya sistem demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus hoaks yang berkaitan dengan proses pemilu dan kebijakan publik telah berulang kali terjadi. Kasus Ratna Sarumpaet pada 2018, misalnya, menjadi ilustrasi bagaimana sebuah kebohongan yang tersebar viral di media sosial mampu memicu reaksi politik skala besar dan memengaruhi dinamika demokrasi. Pola serupa berulang pada setiap siklus elektoral, dengan intensitas yang cenderung meningkat seiring bertambahnya penggunaan media sosial.

Dari sisi akademik, (Retavia, 2025) menggarisbawahi bahwa potensi media sosial dalam menimbulkan polarisasi dan disinformasi merupakan tantangan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan individu. Diperlukan intervensi sistemik yang melibatkan platform digital, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil secara bersamaan.

Identitas nasional merupakan cerminan nilai-nilai budaya, sejarah, serta karakteristik khas yang menjadi pembeda suatu bangsa dengan bangsa lain (Faslah, 2024). Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama, identitas nasional memiliki peran penting sebagai perekat persatuan sekaligus fondasi dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berkaitan dengan rasa cinta tanah air, tetapi juga tercermin dalam sikap saling menghormati, menjunjung persatuan, serta menjaga etika dalam ruang publik, termasuk di media sosial. Dalam era digital, nilai-nilai identitas nasional menghadapi tantangan besar akibat maraknya disinformasi dan hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat serta melemahkan integritas demokrasi. Penyebaran informasi palsu yang memanfaatkan isu identitas, agama, maupun politik sering kali menimbulkan polarisasi sosial dan konflik di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan identitas nasional melalui pendidikan karakter, literasi digital, dan pemahaman nilai kebangsaan menjadi langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial sehingga demokrasi dapat tetap berjalan secara sehat dan berintegritas (Faslah, 2026).

Filter Bubble, Echo Chamber, dan Polarisasi Politik

Di balik kemudahan koneksi yang ditawarkan media sosial, terdapat mekanisme algoritmik yang justru dapat memperparah fragmentasi sosial dan polarisasi politik. Konsep filter bubble merujuk pada kondisi di mana algoritma platform secara otomatis menyaring dan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi dan perilaku daring pengguna, sehingga seseorang hanya terpapar pada pandangan-pandangan yang sejalan dengan keyakinan yang sudah ada dalam dirinya. Echo chamber, sebagai implikasi lanjutan, menggambarkan situasi di mana individu berada dalam ruang komunikasi tertutup yang hanya dipenuhi oleh suara-suara yang saling memperkuat satu sama lain.

Kedua fenomena ini memiliki implikasi serius bagi kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya dialog antarpihak yang berbeda pandangan, kompromi, serta kemampuan memahami perspektif orang lain. Ketika ruang publik digital justru mendorong homogenisasi opini dalam kelompok-kelompok yang terisolasi satu sama lain, maka kemungkinan terjadinya dialog lintas pandangan semakin menyusut, dan potensi konflik sosial semakin membesar.

(Afifah, 2025) mendeskripsikan fenomena ini sebagai paradoks demokrasi digital: kebebasan informasi yang secara teoretis seharusnya memperkaya diskursus publik, justru dalam praktiknya berpotensi mengikis prinsip-prinsip keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah. Sejalan dengan itu, (Anggraini, 2025) menegaskan bahwa algoritma media sosial memperburuk sirkulasi hoaks dan memperdalam polarisasi dengan menciptakan filter bubble, sehingga mengancam nilai-nilai persatuan dan kohesi sosial yang menjadi fondasi demokrasi. Polarisasi yang diperkuat oleh algoritma media sosial memperkuat segmentasi sosial berbasis identitas dan menyulitkan tercapainya konsensus dalam proses-proses demokratis.

Penelitian komparatif di berbagai negara menunjukkan bahwa intensitas polarisasi politik di media sosial cenderung meningkat menjelang dan selama periode elektoral. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas pada Pemilu 2019 dan 2024, di mana narasi-narasi yang memecah belah berdasarkan afiliasi politik tersebar luas di berbagai platform, meninggalkan jejak keretakan sosial yang memerlukan waktu panjang untuk disembuhkan.

Dimensi Regulasi dan Urgensi Literasi Digital

Menyikapi berbagai tantangan tersebut, setidaknya dua jalur respons utama perlu dipertimbangkan: regulasi dan literasi digital. Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki payung hukum dalam bentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang beberapa kali direvisi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kritik, terutama menyangkut potensi penyalahgunaan untuk membungkam kebebasan berpendapat yang paradoksnya justru melemahkan nilai-nilai demokrasi yang ingin dilindungi.

Sementara itu, dari sisi literasi digital, berbagai kajian menunjukkan korelasi yang kuat antara tingkat literasi digital masyarakat dengan daya tahan mereka terhadap disinformasi. (Afifah, 2025) menekankan bahwa penguatan literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan merupakan salah satu strategi kunci untuk menjaga integritas demokrasi. Hal ini sejalan dengan temuan (Renata, 2025) yang menunjukkan bahwa generasi muda dengan kapasitas literasi digital yang baik lebih mampu bersikap kritis terhadap informasi yang beredar dan lebih aktif berkontribusi secara konstruktif dalam proses demokratis. (Royyani, 2025) memperkuat argumen tersebut dengan menekankan bahwa kesadaran kewarganegaraan digital—yang mencakup kemampuan berpikir kritis dan perilaku etis di ruang digital—merupakan komponen tak terpisahkan dari partisipasi demokratis yang berkualitas di era informasi.

Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah sebagai regulator, platform media sosial sebagai penyedia layanan, lembaga pendidikan sebagai agen literasi, dan masyarakat sipil sebagai pengawas. Tidak ada satu aktor tunggal yang

mampu menanggung tanggung jawab ini sendirian. Ekosistem demokrasi digital yang sehat hanya dapat dibangun melalui sinergi yang erat dari semua elemen tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Media sosial telah menjadi salah satu variabel paling determinan dalam membentuk wajah demokrasi kontemporer. Ia hadir bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai ruang publik digital yang menentukan bagaimana warga berinteraksi dengan sistem politik, membentuk opini, dan berpartisipasi dalam proses-proses demokratis. Di satu sisi, media sosial memperluas jangkauan partisipasi, mempercepat mobilisasi sosial, dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Di sisi lain, ia juga membawa risiko serius berupa penyebaran hoaks, polarisasi opini, melemahnya kepercayaan publik, dan potensi manipulasi proses demokratis.

Tantangan-tantangan ini bersifat struktural dan sistemik, sehingga tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan individual atau solusi teknis sempit. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai kebangsaan, reformasi regulasi platform yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan integritas informasi, serta pembangunan mekanisme kolaborasi multipihak yang kokoh. Dengan demikian, media sosial dapat diarahkan menjadi kekuatan yang memperkuat, bukan melemahkan, fondasi demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afifah, Z. (2025). Kesadaran demokrasi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15890>
- Anggraini, S. (2025). Tantangan demokrasi Pancasila di era digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11).
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Faslah, R. (2026). Pancasila Kompas Moral dan Pendidikan Anti Korupsi. <http://repository.uin-malang.ac.id/27461/>
- Indah, R. N. (2020). Kesalahan logis, hoaks & netizen +62. Presented at Webinar Kampus Desa Indonesia #seri 15, 16 Desember. <https://repository.uin-malang.ac.id/7718/>
- Renata, D. B. (2025). Partisipasi Politik Gen Z dalam Demokrasi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(1). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/12752>
- Retavia, P. (2025). Dampak Media Sosial Terhadap Transformasi Sosial dan Politik di Era Digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(3).
- Royyani, M. (2025). Membangun kesadaran kewarganegaraan di era digital: Tantangan dan strategi menuju partisipasi demokratis. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/18598>